

ANALISIS PIDATO PRESIDEN PRABOWO: JALAN PANJANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Tabah Maryanah

*Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung, Indonesia*

E-mail: tabah.maryanah@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Pidato presiden pada saat pelantikan merupakan momen yang sangat penting karena isi pidato merupakan cerminan visi dan misi presiden, menjadi arah kebijakan selama masa kepemimpinannya serta akan menjadi acuan pembentukan opini publik. Artikel ini merupakan analisis terhadap pidato Presiden Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian adalah kualitatif dengan sumber data utama Pidato Presiden Prabowo saat pelantikan dan berita serta artikel terkait. Data dianalisis menggunakan analisis wacana untuk mengidentifikasi tema utama terkait pemberantasan korupsi dan tantangannya. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memiliki misi pencegahan dan penindakan korupsi yang cukup menjanjikan. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Strategi yang dijanjikan adalah melaksanakan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, digitalisasi proses politik dan pemerintahan serta mewajibkan seluruh unsur pimpinan untuk memberi contoh dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi di Indonesia telah demikian parah sehingga menghambat perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Artikel ini akan mengeksplorasi meskipun dengan komitmen Presiden pemberantasan korupsi memiliki peluang namun juga memiliki tantangan yang tinggi.

Kata Kunci: *Analisis Pidato, Presiden Prabowo, Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan Bersih*

ABSTRACT

The president's speech during the inauguration is a very important moment because the content of the speech is a reflection of the president's vision and mission and will be a reference for the formation of public opinion. This article is an analysis of President Prabowo's speech related to corruption eradication in Indonesia. The research method is qualitative with the main data source of President Prabowo's speech during the inauguration and related news and articles. The data was analyzed using discourse analysis to identify the main themes related to corruption eradication and its challenges. In his speech, President Prabowo has a promising mission to prevent and prosecute corruption. President Prabowo is committed to realizing a clean and trustworthy government. His strategy is to implement system improvements, strict law enforcement, digitalization of political and government

processes and require all elements of leadership to set an example in the fight against corruption. However, corruption in Indonesia has been so severe that it has hampered social, political and economic development. This article will explore that despite the President's commitment, corruption eradication has opportunities but also has high challenges.

Keywords: *Speech Analysis, President Prabowo, Corruption Eradication, Clean Government*

PENDAHULUAN

Pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (BPMI Setpres, 2022). Sebagaimana tradisi pelantikan presiden di Indonesia maupun di seluruh dunia, setelah dilantik presiden akan menyampaikan pidato. Pidato pelantikan presiden sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak karena isi pidato akan memberikan gambaran tentang kebijakan presiden selama masa jabatannya dan memunculkan aneka ragam opini publik.

Sebelum pelantikan Presiden Prabowo tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Menurut catatan Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2024 adalah 34 dari nilai maksimal 100. Perolehan angka 34 menempatkan Indonesia di urutan 115 negara terkorup di dunia (Ernes, 2024). Hal ini tidak mengherankan karena korupsi telah menjadi masalah sistemik yang mendalam, yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, dari sektor publik

hingga swasta. Meski berbagai kebijakan antikorupsi sudah diterapkan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tantangan besar tetap ada, seperti intervensi politik, persaingan antar lembaga penegak hukum, dan praktik tarik ulur dalam penanganan kasus-kasus besar. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan kelemahan dalam implementasi hukum antikorupsi, dengan ketergantungan pada kekuatan politik dan ekonomi yang kuat. Misalnya, upaya KPK sering kali dihadapkan pada konflik kepentingan antara kepolisian dan kejaksaan, yang mencerminkan ketegangan antar institusi yang terlibat dalam penegakan hukum. Selain itu, reformasi birokrasi masih lamban, dan kurangnya harmonisasi kelembagaan menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif. Kasus-kasus korupsi profil tinggi sering kali melibatkan aktor dengan pengaruh besar di pemerintahan, membuat proses hukum terhadap mereka sering kali ditarik ulur. Sebagai contoh, beberapa kasus besar mengungkapkan korupsi dalam lembaga negara dan pemerintahan daerah, menunjukkan betapa luasnya jangkauan masalah ini.

Hal ini memperparah persepsi publik terhadap sistem politik yang dianggap korup dan tidak adil. Untuk merespons masalah ini, upaya reformasi lebih lanjut sangat diperlukan, baik dalam bentuk penegakan hukum yang lebih responsif maupun revisi peraturan

perundang-undangan yang mendukung transparansi. Langkah-langkah konkret untuk mengharmonisasikan hubungan antar lembaga penegak hukum diharapkan dapat mengurangi hambatan struktural dalam pemberantasan korupsi

KAJIAN PUSTAKA

Pidato seorang presiden, terlebih lagi diucapkan dalam pelantikan, merupakan momen politik yang sangat penting (Bagaskoro, 2021). Pidato pelantikan presiden memiliki arti yang strategis karena dapat memunculkan beragam makna. Pidato presiden dapat menjadi momen untuk menyatukan bangsa yang terpecah selama masa kampanye, sebagaimana yang dilakukan oleh Thomas Jefferson (Beasley, 2021). Jefferson dalam pidato pelantikannya menekankan pentingnya mematuhi aturan konstitusi meskipun ada perbedaan politik. Pidato Presiden juga menjadi *platform* penting bagi presiden untuk menyampaikan rencana

dan visinya bagi masa depan negara (Beasley, 2021). Pidato pelantikan presiden juga menjadi arah kebijakan untuk lima tahun masa selanjutnya (National Museum of American History, 2021). Di Indonesia, konteks pelantikan presiden juga memiliki arti yang serupa. Presiden yang baru dilantik diharapkan menyampaikan visinya dalam memajukan bangsa, memberantas masalah-masalah utama seperti korupsi, dan memperkuat persatuan di tengah dinamika sosial-politik. Setiap pidato pelantikan mencerminkan arah kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun mendatang, termasuk strategi untuk menghadapi tantangan domestik maupun global.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif (Sugiono, 2017). Sumber data utama adalah pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024. Sumber data sekunder berasal dari berita serta artikel terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis isi. Analisis isi biasa digunakan untuk menganalisis dan memahami komunikasi, baik dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video. Analisis isi memiliki tujuan memahami makna, konteks, dan pola dalam komunikasi (Neuendorf, 2002). Analisis isi dilakukan dengan cara

mengidentifikasi tema utama terkait pemberantasan korupsi dan tantangannya dan kemudian menginterpretasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan salah satu tema yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2024. Korupsi merupakan tema ke-6 dalam urutan isi pidato dari 30 tema. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dan pemberantasannya merupakan salah

satu perhatian Presiden, sebagaimana kutipan berikut pidato berikut:

“Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan lah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah.” (Subianto, 2024)

1. Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu utama dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto karena korupsi telah lama menjadi penghambat utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa korupsi adalah masalah yang perlu ditangani dengan tegas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil (Strangio, 2024). Presiden berjanji untuk memberantas korupsi yang telah

mengakar dalam sistem pemerintahan, yang berdampak langsung pada kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial (Selangor, 2024). Korupsi memiliki dampak besar terhadap pembangunan bangsa. Menurut berbagai laporan, praktik korupsi telah menggerogoti sumber daya negara, mengurangi efektivitas kebijakan publik, dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Strangio, 2024). Di sektor ekonomi, korupsi memperlambat investasi, baik domestik maupun asing, karena ketidakpastian hukum dan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Ini juga berkontribusi pada kemiskinan yang berkepanjangan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dialihkan oleh para koruptor (Selangor, 2024) Prabowo menekankan bahwa untuk mencapai kemandirian di bidang pangan dan energi, pemerintahannya harus bebas dari praktik-praktik korupsi (Strangio, 2024). Dengan memberantas korupsi, Indonesia dapat memanfaatkan lebih banyak sumber dayanya untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan daya saing global (Selangor, 2024).

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden, Prabowo Subianto secara tegas menyatakan komitmennya untuk memerangi korupsi, menjadikannya salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya. Ada empat poin utama tekad kuat Presiden Prabowo untuk memberantas, yaitu: 1) **Korupsi sebagai Penghambat Kemajuan Bangsa.** Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi telah menjadi ancaman besar bagi

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Menurutnya, korupsi menciptakan ketidakadilan dan memperparah kemiskinan, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Dia menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Strangio, 2024).

2) **Pentingnya Pemerintahan yang Bersih.**

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berjanji akan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan fokus pada reformasi birokrasi dan penguatan hukum untuk memberantas praktik-praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan. Dia menyatakan, "Kita harus berani menghadapi masalah ini, dan kita harus berani menyelesaikannya" (Selangor, 2024).

3) **Penguatan Institusi Penegak Hukum.**

Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam upaya bersama memberantas korupsi. Dia berjanji bahwa tidak akan ada toleransi terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan mereka yang terlibat dalam praktik korupsi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku (Awani, 2024).

4) **Pengaruh Pemberantasan Korupsi terhadap Pembangunan Nasional.**

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kemandirian ekonomi. Dia menegaskan bahwa hanya dengan memerangi korupsi, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang adil dan merata (Strangio, 2024) (Strangio, 2024). Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya

menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Presiden memandang korupsi sebagai masalah struktural yang menghalangi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki layanan publik, dan mengurangi kemiskinan. Menurut Prabowo, korupsi tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial, karena sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Strangio, 2024) (Selangor, 2024). Presiden Prabowo menyadari bahwa pemberantasan korupsi sangat penting untuk memperkuat sektor ekonomi dan memajukan pembangunan. Dalam perspektifnya, korupsi menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi investasi dan memperburuk kesenjangan ekonomi, yang pada gilirannya memperlambat upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pangan dan energi (Strangio, 2024) (Strangio, 2024). Presiden juga menegaskan pentingnya memperbaiki integritas lembaga-lembaga pemerintahan, terutama institusi penegak hukum seperti pengadilan, polisi, dan kejaksaan, yang kerap menjadi sasaran praktik korupsi. Prabowo berjanji akan memperkuat pengawasan dan meningkatkan gaji hakim untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam korupsi (Asia, 2024).

2. Strategi Pemberantasan Korupsi

Strategi yang dijanjikan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi adalah melaksanakan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, digitalisasi proses politik dan

pemerintahan serta mewajibkan seluruh unsur pimpinan untuk memberi contoh dalam pemberantasan korupsi. Berikut uraian dari masing-masing strategi. *Pertama*, Perbaikan Sistem. Perbaikan sistem adalah langkah awal dan esensial dalam strategi pemberantasan korupsi. Prabowo memandang bahwa korupsi sering kali terjadi karena adanya celah dalam sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, memperbaiki sistem ini menjadi prioritas utama agar korupsi dapat dicegah di setiap tingkatan pemerintahan. Ada dua aspek penting yang dapat diperbaiki dalam sistem untuk mencegah korupsi. 1) transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini termasuk proses anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset publik. Dengan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, ruang gerak korupsi akan semakin kecil. Pengawasan eksternal dari lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan benar. 2) Reformasi birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel. Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan sering kali membuka peluang bagi tindakan korupsi, baik dalam bentuk suap maupun pungutan liar. Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang memungkinkan terciptanya sistem yang lebih sederhana, cepat, dan akuntabel, sehingga meminimalkan ruang bagi praktek-praktek koruptif. Perbaikan sistem juga harus mencakup penerapan mekanisme check and balance yang efektif antar-lembaga negara. Ketika sistem ini berjalan dengan baik, setiap

kebijakan dan tindakan pejabat negara dapat diawasi secara lebih ketat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Selain itu, kebijakan perbaikan sistem juga harus didukung dengan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sistem tersebut.

Kedua, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas merupakan elemen sentral dari strategi Prabowo dalam memberantas korupsi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan adil, strategi pemberantasan korupsi akan sulit untuk berhasil. Oleh karena itu, Prabowo berjanji untuk mengedepankan prinsip hukum yang adil, di mana setiap pelaku korupsi akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu, baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah independensi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Dalam strategi ini, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat independensi KPK, agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus-kasus korupsi yang kompleks, termasuk yang melibatkan aktor-aktor besar dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Dalam hal ini, Prabowo juga perlu menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum yang tegas hanya dapat tercapai jika ada kerjasama yang baik antar-institusi, baik di tingkat

nasional maupun internasional, terutama dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan aliran dana lintas negara. Untuk memastikan efek jera, hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi haruslah berat dan memberikan dampak yang signifikan. Prabowo mendukung penerapan sanksi-sanksi yang keras terhadap para koruptor, baik dalam bentuk hukuman penjara yang lama, denda yang besar, maupun penyitaan aset hasil korupsi. Dengan demikian, koruptor tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga secara finansial, sehingga mencegah mereka untuk menikmati hasil dari perbuatan mereka.

Ketiga, Digitalisasi Proses Politik dan Pemerintahan. Digitalisasi menjadi salah satu langkah penting dalam upaya Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era teknologi informasi, penggunaan sistem digital dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara memperkecil interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap setiap proses administrasi dan birokrasi. Salah satu contoh konkret dari digitalisasi adalah penerapan *e-government*, di mana setiap layanan publik dan administrasi pemerintahan dilakukan secara daring. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi dan pengambilan keputusan pemerintah. Setiap transaksi dapat dicatat secara digital dan dapat diakses oleh publik, sehingga menciptakan transparansi yang tinggi dan meminimalkan peluang bagi praktik korupsi. Selain itu, digitalisasi juga dapat diterapkan dalam

sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sistem *e-procurement*, proses pengadaan dapat diawasi secara terbuka, sehingga meminimalkan potensi suap atau kolusi dalam proses tender. Semua proses pengadaan dapat diakses dan diaudit oleh pihak-pihak yang berwenang, serta publik dapat memantau apakah proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan. Dalam konteks politik, digitalisasi juga berperan penting dalam memastikan proses pemilihan umum yang jujur dan bebas dari kecurangan. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pemilu, seperti pendaftaran pemilih, penghitungan suara, dan pengawasan dana kampanye, dapat dilakukan secara lebih transparan dan akurat. Dengan demikian, proses politik dapat lebih bebas dari intervensi atau manipulasi yang berpotensi korupsi.

Langkah digitalisasi ini penting untuk diambil mengingat semakin banyaknya jumlah korupsi. Catatan Tempo.co menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, baik dari aspek angka korupsi, jumlah tersangka maupun jumlah potensi kerugian negara, meningkat secara signifikan. Detail dari peningkatan korupsi di Indonesia lima tahun terakhir tersaji dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Korupsi di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Potensi Kerugian Negara (triliun rupiah)
2019	271	580	8,4
2020	444	875	18,6
2021	533	1.173	29,4
2022	579	1.369	42,7
2023	791	1.695	28,4

Sumber: diolah dari (Ade Ridwan Yandwiputra, 2024)

Keempat, teladan dari unsur pimpinan. Prabowo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari para pemimpin. Para pemimpin harus menjadi teladan dalam integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Hal ini penting karena korupsi sering kali bersifat top-down, artinya jika pemimpin menunjukkan perilaku yang korup, maka bawahannya cenderung akan mengikuti. Oleh karena itu, dalam strategi Prabowo, unsur pimpinan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus memberikan contoh yang baik dalam pemberantasan korupsi. Para pemimpin diharapkan untuk menunjukkan kepemimpinan yang bersih, di mana mereka tidak hanya berperilaku jujur dan transparan, tetapi juga secara aktif menolak dan melaporkan setiap indikasi korupsi di lingkungan mereka. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi akan memberikan dampak positif terhadap perilaku aparatur negara di bawahnya dan menciptakan budaya kerja yang lebih bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, para pemimpin juga harus berkomitmen untuk mengungkap dan menindaklanjuti setiap kasus korupsi yang terjadi di institusi mereka. Komitmen ini akan menjadi fondasi bagi keberhasilan program pemberantasan korupsi, karena pemimpin yang tegas dalam melawan korupsi akan menciptakan efek domino yang mempengaruhi seluruh organisasi.

3. Evaluasi Tantangan dan Potensi Hambatan

Komitmen Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya sangat tinggi. Namun, eksekusi dari komitmen tersebut akan sangat ditentukan oleh

berbagai macam faktor. Setidaknya ada enam faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan janjinya. *Pertama*, budaya korupsi yang telah mengakar. Salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan korupsi di Indonesia adalah budaya korupsi yang telah lama mengakar di berbagai tingkatan pemerintahan. Di banyak instansi pemerintah, korupsi telah menjadi semacam "tradisi" yang sulit diberantas. Banyak pegawai pemerintah, dari tingkat bawah hingga atas, terlibat dalam praktik suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Praktik-praktik korupsi demikian telah menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang setiap tahun diukur oleh lembaga *Transparency International*, Indonesia rendah. Angka IPK yang diperoleh Indonesia sepuluh terakhir hanya berkisar antara 34 hingga 40. Capaian tertinggi IPK, yakni 40 hanya terjadi pada tahun 2019. Tahun 2020 dan seterusnya menurun dan tahun 2024 ini, IPK Indonesia kembali seperti 10 tahun lalu, yakni 34 (Medistiara, 2024). Mengubah budaya ini bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika korupsi sudah dianggap sebagai bagian dari sistem birokrasi. Prabowo perlu menghadapi resistensi dari individu-individu yang diuntungkan dari sistem korup yang ada. Selain itu, sulitnya mendeteksi korupsi yang terjadi secara sistemik, terutama dalam bentuk kolusi dan nepotisme, membuat tugas pemberantasan korupsi semakin rumit. Penghapusan korupsi pada level yang dalam ini memerlukan upaya yang lebih dari sekadar penegakan hukum; butuh perubahan budaya yang mendasar di lingkungan pemerintah.

Kedua, terkait dengan tantangan pertama, tantangan kedua yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penegakan sanksi dan hukuman. Meskipun Prabowo berkomitmen untuk menerapkan hukuman yang tegas terhadap para pelaku korupsi, implementasi sanksi yang adil dan efektif tetap menjadi tantangan besar. Dalam beberapa kasus, para pelaku korupsi yang berkuasa sering kali lolos dari jeratan hukum karena memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar. Selain itu, proses hukum yang berbelit-belit dan lambat di Indonesia juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan sanksi terhadap koruptor. Untuk mengatasi ini, Prabowo harus bekerja keras dalam memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara adil dan tidak memihak. Ini termasuk memperkuat independensi pengadilan dan mendorong transparansi dalam proses peradilan, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanipulasi proses hukum demi kepentingan pribadi. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali terdapat tantangan besar terkait kekuatan politik dan ekonomi dari para pelaku, yang mempengaruhi jalannya proses hukum. Salah satu kasus yang dapat menggambarkan hal ini adalah kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah atau pejabat tinggi yang memiliki akses ke sumber daya politik dan ekonomi. Dalam banyak kasus, meskipun mereka terlibat dalam korupsi, sanksi yang dijatuhkan bisa menjadi ringan atau bahkan ada yang lolos dari jeratan hukum. Banyak kasus di mana kepala daerah terlibat dalam korupsi, tetapi mereka masih mampu mempertahankan kekuatan politiknya dan mempengaruhi

keputusan hukum. Kasus Wali Kota Batu, misalnya, menggambarkan bagaimana kekuatan politik lokal yang kuat dapat mempengaruhi proses peradilan (Arsandi, 2022). Dalam kasus tersebut, meskipun ada bukti kuat keterlibatan dalam korupsi, dukungan dari jaringan politik lokal membuat hukuman yang diterima lebih ringan dari yang diharapkan, atau proses hukumnya menjadi sangat lambat dan berbelit-belit. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan elite politik sering lemah (Taryanto & Prasajo, 2022). Tidak efektifnya pencegahan korupsi juga terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Good Corporate Governance di BUMN sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi yang kuat, sehingga menyebabkan tidak efektifnya pencegahan korupsi dan sulitnya menegakkan sanksi yang tegas terhadap para pelaku” (Saptono & Purwanto, 2022). Ketidakmampuan institusi hukum untuk bekerja secara independen dari pengaruh politik menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan sanksi yang adil dan efektif. Hal ini sering kali memperpanjang proses hukum, sehingga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden Prabowo berkomitmen untuk menerapkan hukuman yang tegas, tantangan politik dan ekonomi dari pelaku korupsi yang berkuasa akan terus menjadi rintangan besar dalam mewujudkan sanksi yang adil dan efektif.

Ketiga, terkait dengan tantangan pertama dan kedua, yakni pembangunan sistem hukum yang kuat. Pembangunan sistem hukum yang kuat akan berhadapan dengan kelemahan institusi penegak hukum yang ada saat ini. Meskipun Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, pemerintahannya akan menghadapi tantangan terkait kelemahan institusi penegak hukum di Indonesia. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap kali dihadapkan pada masalah independensi, keterbatasan sumber daya, dan dalam beberapa kasus, keterlibatan dalam praktik korupsi itu sendiri. Bahkan, KPK, lembaga yang merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi telah dilemahkan oleh pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Joko Widodo, dengan cara merevisi KPK menjadi bagian dari layanan sipil pada tahun 2019. Hal ini telah menyebabkan KPK menjadi lebih rentan terhadap intervensi pemerintah. Meskipun Jokowi di awal masa jabatannya berfokus pada pemberantasan korupsi, terutama dengan memperkuat lembaga KPK, langkah-langkahnya dalam jangka panjang justru dianggap menurunkan efektivitas KPK, terutama dalam menangani kasus korupsi besar yang melibatkan aktor politik utama (Risks, 2024).

Institusi penegak hukum di Indonesia sering kali dikritik karena kurang efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Selain itu, korupsi di dalam lembaga penegak hukum sendiri dapat menghambat proses penegakan keadilan.

Prabowo harus melakukan reformasi menyeluruh di lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa mereka benar-benar independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prabowo tampaknya mengadopsi pendekatan yang lebih fokus pada pencegahan daripada penegakan hukum yang agresif terhadap koruptor. Meskipun ia berjanji untuk memperkuat KPK, visi Prabowo terkait dengan KPK adalah menjadikannya "pusat keunggulan" yang berfokus pada pendidikan anti-korupsi dan upaya pencegahan. Namun, ia cenderung tidak mendukung revisi besar-besaran undang-undang KPK untuk mengembalikan independensinya, yang berpotensi membuat lembaga ini tetap berada di bawah pengaruh pemerintah (Risks, 2024). Oleh karenanya perlu langkah-langkah konkret untuk memperkuat institusi hukum, termasuk peran KPK, kepolisian, dan kejaksaan.

Keempat, resistensi dari elite politik dan birokrasi. Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kebijakan presiden, tetapi juga pada dukungan dari para elit politik dan birokrasi. Prabowo kemungkinan besar akan menghadapi resistensi dari beberapa elit politik yang mungkin merasa terancam oleh kebijakan anti-korupsinya. Para elit yang terlibat dalam praktik korupsi, atau yang mendapatkan keuntungan dari *status quo*, mungkin mencoba menghambat atau bahkan melawan inisiatif anti-korupsi prabowo. Resistensi juga bisa datang dari kalangan birokrasi, terutama di lembaga-lembaga yang selama ini terbiasa bekerja dengan cara-cara yang kurang transparan. Terlebih lagi pemerintah sebelumnya, yakni

Pemerintahan Jokowi, berupaya Jokowi memberlakukan *Asset Forfeiture Bill* yang bertujuan menyita aset-aset hasil korupsi. Meskipun Prabowo mendukung undang-undang ini, penerapannya menghadapi tantangan politik yang signifikan dari legislator yang merasa terancam oleh transparansi tambahan mengenai sumber dana politik mereka (Risks, 2024). Dengan demikian, pembenahan birokrasi yang efisien dan bersih akan membutuhkan upaya yang besar dalam mengatasi resistensi dari mereka yang merasa nyaman dengan sistem lama.

Kelima, Digitalisasi proses politik, pemerintahan, dan layanan publik. Cara kerja birokrasi yang selama ini kurang transparan akan dapat diminimalkan dengan penerapan digitalisasi yang terbatas. Ada dua faktor yang akan mendukung mendukung proses digitalisasi, yaitu: faktor infrastruktur dan faktor sumber daya manusia. Faktor infrastruktur setidaknya membutuhkan tiga hal, yakni: 1) ketersediaan jaringan listrik yang cukup untuk mengoperasikan perangkat elektronik; 2) ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak modern, yang sesuai dengan kebutuhan layanan publik; 3) ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil agar aplikasi berbagai layanan publik dapat berjalan dengan optimal. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah terbatasnya infrastruktur digital di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya akses teknologi di daerah-daerah ini membuat penerapan *e-government* dan *e-procurement* menjadi sulit, sehingga proses administrasi dan pengadaan barang di daerah masih rentan terhadap

praktik korupsi. Selain itu, masih ada tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Banyak aparatur negara yang mungkin belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital, yang bisa memperlambat implementasi digitalisasi dalam skala nasional. Dengan demikian, daerah-daerah yang telah memiliki infrastruktur listrik dan jaringan internet memadai dapat segera menerapkan digitalisasi dalam proses politik, pemerintahan, dan penyelenggaraan layanan publik. Sedangkan daerah dengan infrastruktur dan SDM belum memadai perlu upaya lebih agar dapat menerapkan digitalisasi.

Keenam, Penguatan Pengawasan Publik. Pemberantasan korupsi tidak akan bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah tanpa partisipasi dari publik. Keterlibatan publik dalam pengawasan akan turut mencegah terjadinya korupsi oleh elit maupun oleh pejabat publik. Meskipun demikian, ada kalanya praktik korupsi juga sering melibatkan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi pemerintahan Prabowo Gibran memperhatikan penguatan pengawasan publik. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Banyak masyarakat yang masih bersikap apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum dan birokrasi. Korupsi yang mengakar dalam birokrasi dan institusi pemerintahan menyebabkan masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan nyata. Mereka

juga sering kali enggan terlibat dalam pengawasan karena merasa takut akan ancaman atau represi dari pihak-pihak yang berkuasa (Saptono & Purwanto, 2022). Hal ini menjadikan pengawasan publik kurang efektif, karena seharusnya masyarakat menjadi mata dan telinga dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena itu fasilitas pelaporan yang aman bagi pelapor perlu dikembangkan.

KESIMPULAN

Optimisme terhadap janji Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih membawa harapan baru bagi banyak masyarakat Indonesia. Prabowo telah menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas dalam pemerintahannya, dengan fokus pada reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di berbagai sektor. Visi ini disambut baik oleh publik yang menantikan perubahan nyata, terutama setelah beberapa dekade di mana korupsi dianggap sebagai penghambat utama pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Namun, meskipun ada optimisme, tantangan ke depan juga signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Prabowo dapat memadukan pendekatan anti-korupsi dengan dinamika politik Indonesia, yang seringkali didominasi oleh kepentingan elit dan patronase politik. Banyak pengamat politik menyatakan bahwa resistensi dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh *status quo* korupsi bisa menjadi hambatan besar bagi reformasi yang diusulkan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa KPK, yang telah dilemahkan pada masa pemerintahan sebelumnya, mungkin

tidak mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya untuk bertindak secara independen. Meskipun begitu, Prabowo tetap optimis bahwa dengan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan dukungan masyarakat, agenda anti-korupsi ini bisa membuahkan hasil nyata. Harapannya, jika langkah-langkah ini dijalankan secara efektif, Indonesia akan menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan transparan, dengan ekonomi yang lebih kuat dan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting dan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Salah satu cara masyarakat berperan adalah dengan bertindak sebagai pengawas atau *watchdog*, memantau dan melaporkan tindak korupsi yang terjadi, serta memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menerapkan reformasi yang lebih ketat. Masyarakat dapat terlibat melalui mekanisme pelaporan korupsi, partisipasi dalam kampanye anti-korupsi, dan berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung transparansi. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat

memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Lebih jauh, peran masyarakat dapat diperkuat dengan adanya akses informasi yang memadai. Inisiatif seperti kebebasan informasi

dan platform digital untuk pengawasan publik memungkinkan warga untuk ikut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah, serta melaporkan dugaan tindakan korupsi melalui saluran yang aman dan anonim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ridwan Yandwiputra. (2024). *ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan Singnifikan 5 Tahun Terakhir*. Tempo.Co.
<https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431>
- Asia, C. N. (2024). *Indonesia President-elect Prabowo promises higher salaries, improved benefits for judges amid nationwide strike*. Channel News Asia.
<https://www.channelnewsasia.com/asia/prabowo-judges-strike-salary-inflation-corruption-indonesia-4667826>
- Awani, A. (2024). *Prabowo takes up Indonesian presidency, vows to tackle corruption, other issues*. Astro Awani Internasional.
<https://international.astroawani.com/global-news/prabowo-takes-indonesian-presidency-vows-tackle-corruption-other-issues-492611>
- Bagaskoro, G. (2021). Analisis Diksi Pidato Kemenangan Presiden Joe Biden. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra (e ...)*, 01(02), 30–42.
<http://aksiologi.org/index.php/tanda/article/view/118%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/tanda/article/download/118/51>
- Beasley, V. B. (2021). *Words Matter: What an Inaugural Address Means Now*. Vanderbilt.
<https://www.vanderbilt.edu/unity/2021/01/15/words-matter/>
- BPMI Setpres. (2022). *Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI*. Biro Pers, Media, Dan Informasi Sekretariat Presiden.
<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/>
- Ernes, Y. (2024). *Naik Turun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama 10 Tahun Era Jokowi*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-7577566/naik-turun-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selama-10-tahun-era-jokowi?single=1>
- Medistiara, Y. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Diyakini Naik di Pemerintahan Prabowo*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-7602004/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-diyakini-naik-di-pemerintahan-prabowo>

- National Museum of American History. (2021). *The Inaugural Address: Why Do Presidents Start a New Term With a Speech?* Smithsonian Institution. <https://learninglab.si.edu/collections/the-inaugural-address-why-do-presidents-start-a-new-term-with-a-speech/gBt51u2wQNbyd08h>
- Neuendorf, K. A. (2002). The Content Analysis Handbook. In *Sage Publications*.
- Risks, C. (2024). *Indonesia: Anti-corruption drive unlikely to strengthen after presidential race*. CSIS. <https://www.controlrisk.com/our-thinking/inside/indonesia-anticorruption-drive-unlikely-to-strengthen-after-presidential-race>
- Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2022). Analysis of good corporate governance's ineffectiveness in preventing corruption in BUMN. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 77–94. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/870>
- Selangor. (2024). *Prabowo Vows To Tackle Corruption Other Issues In Inauguration Speech*. Selangor TV. <https://selangorjournal.my/2024/10/prabowo-vows-to-tackle-corruption-other-issues-in-inauguration-speech/>
- Strangio, S. (2024). *Prabowo Subianto Sworn In As Indonesia's Eighth President*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2024/10/prabowo-subianto-sworn-in-as-indonesias-eighth-president/>
- Subianto, P. (2024). *Pidato Presiden Prabowo Subianto*.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taryanto, T., & Prasajo, E. (2022). Analisis Manajemen Kinerja KPK dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>